

RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang1

1.2 Landasan Hukum2

1.3 Maksud dan Tujuan.....3

1.4 Sistematika Penulisan3

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU7

2.1.A Pengolahan Data dan Informasi7

1.1 Organisasi Tatalaksana Perangkat Daerah.....7

Gambar 1. Struktur Organisasi BKPP7

2.1.B Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian

RENSTRA BKPP9

1. Realisasi Program/ Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

Hasil/Keluaran yang Dihasilkan13

2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja

Hasil/Keluaran yang Direncanakan13

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja

Hasil/Keluaran yang Direncanakan13

4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi

Target Kinerja Program/Kegiatan.....14

5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program RENSTRA BKPP15

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil

Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja

Program/Kegiatan15

Tabel T-C. 2916

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPP20

Tabel T.C. 3021

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPP22

1. Permasalahan dan Hambatan22

2. Tantangan.....23

3. Peluang23

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD23

Tabel T-C. 3125

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat26

Tabel T-C. 3227

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....29

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional29

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA BKPP.....30

A. Tujuan30

B. Sasaran30

3.3 Program dan Kegiatan BKPP.....31

A. Program BKPP31

B. Kegiatan BKPP31

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah32

2. Program Kepegawaian Daerah33

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.....33

Tabel T-C. 33.....34

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH38

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas39

BAB V

PENUTUP.....46

1. Catatan Penting.....46

2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan46

3. Rencana Tindak Lanjut.....46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan (1 tahun). Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen yang secara substantial penerjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra).
2. Renja merupakan acuan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja pada tahun 2024 ini merupakan tahun ke-3 pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Malinau memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan penyusunan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan, pengorganisasian pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan. Prioritas Renja BKPP Tahun 2024

diarahkan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan program Kepegawaian Daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan sasaran pelaksanaan tahun 2024.

Sistematika Penyusunan Renja BKPP Kabupaten Malinau Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mencakup antara lain :

1. Program dalam renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.
2. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Malinau 2021-2026 **"Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang profesional."** Dan Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan " Terwujudnya Aparatur Yang Profesional."

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Malinau menyusun Rencana Kerja tahun 2024. Penyusunan Renja tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD 2021-2026. Renja ini yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran BKPP.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati No 43 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan maksud sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2023, dan perencanaan program / kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2024.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 (Satu) tahun serta menjabarkan program / kegiatan prioritas.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah serta sebagai landasan acuan penetapan indikator kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan.
3. Menjadi pedoman evaluasi dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

- **BAB. I. PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan Antara Renja OPD dengan dokumen RKPD Renstra OPD, dengan K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Iota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

- **BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun

berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi OPD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta penjelasannya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

• BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berisi uraian rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan-penjelasan apabila rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, atau pagu indikatif.

- **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan BKPP**

- **Bab V Penutup**

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut dalam rangka

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah, Rencana Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, perlu dilakukan kajian (review) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mengetahui pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024, maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

1. 1 Organisasi dan Tatalaksana Perangkat Daerah

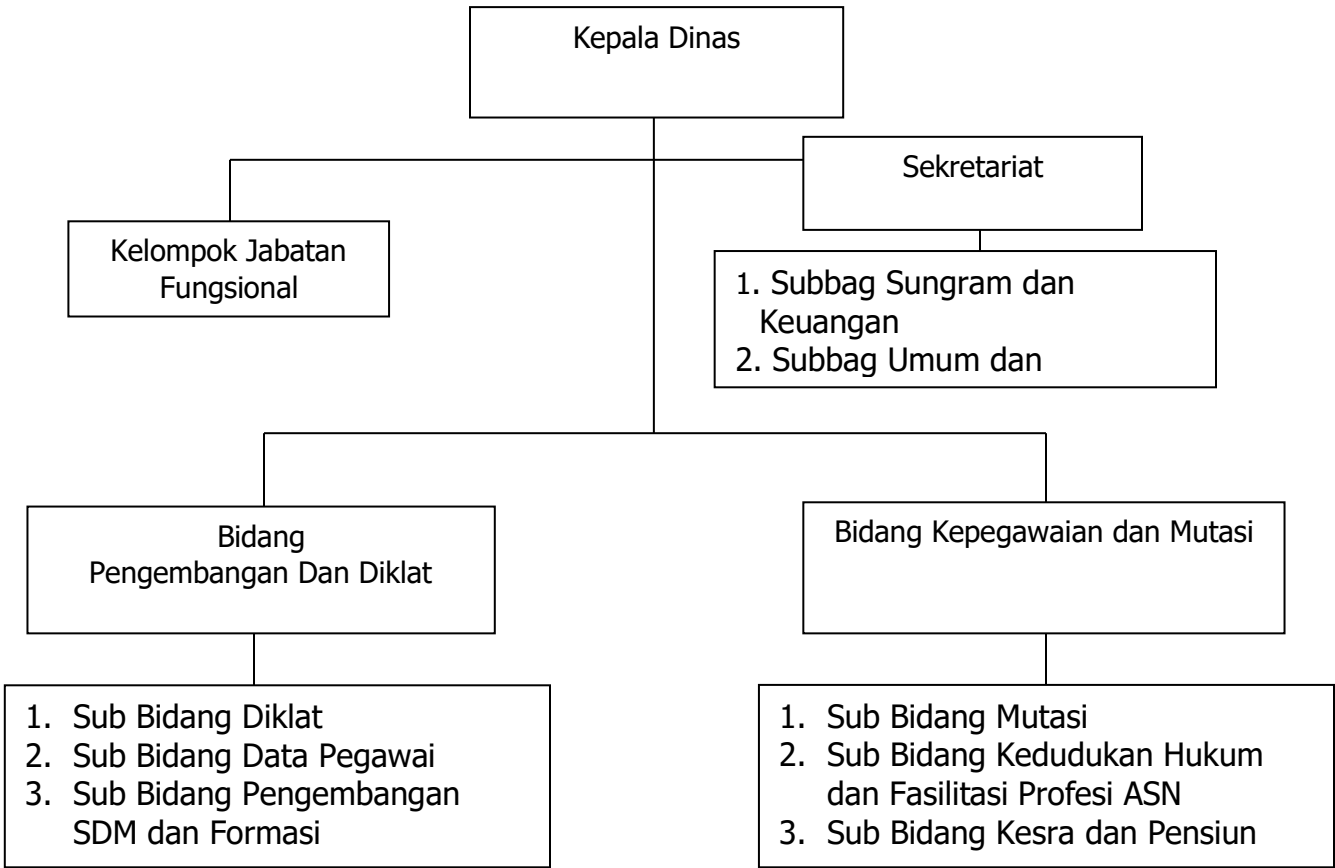
Pembentukan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Bupati No.44 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah. Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau terdiri atas :

- a. *Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;*
- b. *Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri dari:*
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;

- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. *Unsur Pelaksana terdiri dari 2 (dua) Bidang, yaitu :*
 - 1. Bidang Pengembangan dan Diklat dari:
 - a. Sub Bidang Diklat;
 - b. Sub Bidang Data Pegawai;
 - c. Sub Bidang Pengembanagn SDM dan Formasi.
 - 2. Bidang Kepegawaian dan Mutasi:
 - a. Sub Bidang Mutasi;
 - b. Sub Bidang Kedudukan Hukum;
 - c. Sub Bidang Kesra dan Pensiun.
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini diagram struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Malinau :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKPP Kab.Malinau



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKPP Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPP

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja SKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan akan diperoleh informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat.

Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksanaan program dan kegiatan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja SKPD tahun - tahun sebelumnya.

Tujuan dari evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya antara lain untuk :

1. Mengetahui realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target capaian kinerja yang direncanakan, beserta faktor penyebabnya.
2. Mengetahui Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
3. Dasar kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada tahun 2023, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau melaksanakan 3 (Tiga) program dengan 8 (Delapan) kegiatan dan 18 (Delapan Belas Sub.Kegiatan). Anggaran Belanja Langsung tahun 2023 sebesar Rp 19.307.098.515,00 Dari jumlah anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 16.804.512.994,00 atau 87.04%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPP dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BKPP 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KABUPATEN	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Peyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawai
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem informasi Kepegawaian
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
			Evaluasi data, Informasi dan system Informasi Kepegawaian
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan ASN
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS atau PPPK
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
			Pengelolaan Data Kepegawaian
		MUTASI DAN PROMOSI ASN	Pengelolaan Mutasi ASN
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
			Pengelolaan Promosi ASN
		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
			Pengelolaan Assesment Center
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		PENILAIN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
			Pembinaan Disiplin ASN
			Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja
			Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Sosialisasi Perundang-undangan
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
			Pelayanan Proses Ijin Perceraai Pegawai

3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SERIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
---	--	--	---

Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Malinau didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BKPP KAB. MALINAU
TAHUN 2023

SASARAN	IKU BKPP	TARGET	REALISASI
Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu	63%	87,16%
Meningkatnya PNS yang kompeten sesuai bidang tugasnya.	Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2,83%	6,15%
	Persentase pejabat PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	30%	61,59%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Nilai SAKIP	66	66,91

Anggaran Belanja Langsung tahun 2023 sebesar Rp 19.307.098.515,00 Dari jumlah anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 16.804.512.994,00 atau 87.04% tahun 2023.

Realisai anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2,3
Realisasi Anggaran Tahun 2023

no	Kode Rek	PROGRAM KEGIATAN	Anggaran	Realisasi Anggaran
		Kegiatan		
		Sub Kegiatan		
1	2	3	7	
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KABUPATEN	Rp 6.616.809.039	Rp 5.405.521.000

	503.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp 6.237.591.039	Rp 5.046.833.197
1	5.03.01.2.02.01	Peyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6.237.591.039	Rp 5.046.833.197
	5.03.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp 80.198.000	Rp 69.758.767
2	5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawai	Rp 50.000.000	Rp 39.886.800
3	5.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem informasi Kepegawaian	Rp 30.198.000	Rp 29.871.967
	5.03.01.2.06		Rp 299.020.000	Rp 288.929.036
4	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 99.991.000	Rp 90.811.000
5	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 49.150.000	Rp 48.982.308
6	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 149.879.000	Rp 149.135.728
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 8.290.289.476	Rp 8.027.784.458
	5.03.02.2.01	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Rp 169.967.000	Rp 161.381.478
7	5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Rp 119.971.000	Rp 114.802.808
8	5.03.02.2.01.11	Pengolahan Data Kepegawaian	Rp 49.996.000	Rp 46.578.670
	5.03.02.2.02	MUTASI DAN PROMOSI ASN	Rp 2.701.813.476	Rp 2.516.832.223
9	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp 342.229.000	Rp 310.521.421
10	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp 69.956.000	Rp 52.886.231
11	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Rp 2.289.628.476	Rp 2.153.424.571
	5.03.02.2.03	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	Rp 5.192.436.000	Rp 5.143.954.601
12	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Rp 99.500.000	Rp 99.500.000
13	5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp 5.092.936.000	Rp 5.044.454.601
	5.03.02.2.04	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	Rp 226.073.000	Rp 205.616.156
14	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rp 76.073.000	Rp 69.144.756
15	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Rp 100.000.000	Rp 90.243.800

16	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp 30.000.000	Rp 28.537.800
17	5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Ijin Perceraai Pegawai	Rp 20.000.000	Rp 17.689.800
	5.4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 4.400.000.000	Rp 3.371.207.536
	5.04.02.2.02	SERIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	Rp 4.400.000.000	Rp 3.371.207.536
18	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp 4.400.000.000	Rp 3.371.207.536
Jumlah			Rp 19.307.098.515	Rp 16.804.512.994

Adapun capaian target dan realisasi kinerja program BKPP Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada tahun 2023 terdapat 3 (Tiga) Sub.Kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanya dibawah 100%, yakni :

- a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawaian dengan Penyerapan Anggaran (79,77%)
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan Penyerapan Anggaran (75,60%)

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Sebagian besar kegiatan, yakni 13 (Tiga Belas) Sub kegiatan pada BKPP Kab. Malinau pada tahun Anggaran 2023 dapat memenuhi target kinerja 100%.

Adapun kegiatan yang mencapai target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100%) dengan realisasi keuangan 90,82%
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%) dengan realisasi Keuangan 79,07%
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan (100%) dengan realisasi keuangan 99,66%.
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%) dengan realisasi keuangan (99,50%)
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem informasi Kepegawaian (100%) dengan realisasi keuangan (98.92%)
- f. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN (100%) dengan realisasi keuangan (95,69%)
- g. Sub Kegiatan Pengolahan Data Kepegawaian (100%) degan Penyerapan Anggaran (93.16%)
- h. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN (100%) degan Penyerapan Anggaran (100%)
- i. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (100%) degan Penyerapan Anggaran (99,05%)
- j. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai (100%) degan Penyerapan Anggaran (90,89%)
- k. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN (100%) degan Penyerapan Anggaran (90,24%)
- l. Sub Kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (100%) degan Penyerapan Anggaran (95,13%)
- m. Sub Kegiatan Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai (100%) degan Penyerapan Anggaran (88,45%)

3. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran 97% dikarenakan terdapat calon penerima bantuan pendidikan tidak dapat menerima bantuan karena berbenturan dengan aturan yang ada, di sebabkan akreditasi perguruan tinggi dimana penerima beasiswa menempuh pendidikan tidak memenuhi syarat akreditasi.

4. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra BKPP

Implikasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKPP selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

5. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut :

- a. Perencanaan yang benar, akurat, dan terukur dalam penetapan target kinerja hasil atau keluaran.
- b. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
- c. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disiapkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
- d. Untuk pengesahan DPA-P APBD agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja BKPP dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) adalah sebagaimana tersebut terlampir dalam Tabel 2.1 (Lampiran Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja BKPP dan Pencapaian Renstra BKPP)

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPP dan Pencapaian Renstra BKPP

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KAB. MALINAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan /Output	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d 2024	
					Target RenjaTahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
5	Urusan	: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian								
05.03	KEPEGAWAIAN									
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian								
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawaian Yang dilaksanakan								
5.03.02.2.01.00 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	55		0	-	0	0	55	100
5.03.02.2.01.00 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPk	300		0	-	0	0	300	100
5.03.02.2.01.00 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	100		100	114.802.808,00	95,69	100	100	100
5.03.02.2.01.00 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi pelaksanaan Adminiditasi Pemeberhetian	75		0	-	0	0	75	100
5.03.02.2.01.00 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumalh dokumen hasil pengelolaan Data Pegawai	200		200	46.578.670,00	93,16	200	200	100
5.03.02.2.01.00 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Data, Informasi dan Ssistem Informasi Pegawai	3460		0	-	0	0	3460	100
5.03.02.2.02	Keg. Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Mutasi dan Promosi								

5.03.02.2.02.00 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan mutasi habatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar Daerah	150		150	310.521.421,00	90,73	150	150	100
5.03.02.2.02.00 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700		700	52.886.231,00	75,6	700	700	100
5.03.02.2.02.00 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumalh Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN	20		20	2.153.424.571,00	94,05	20	20	100
5.03.02.2.03	Keg. Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi								
5.03.02.2.03.00 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang menngkat kapasitasnya	3459		3459	99.500.000,00	100	3459	3459	100
5.03.02.2.03.00 02	Pengelolaan Assesssment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesssment Center	250		0	-	0	0	250	100
5.03.02.2.03.00 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80		40	5.044.454.601,00	99,05	40	80	100
5.03.02.2.04	Keg Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja AParatur Yang Dilaksanakan								
5.03.02.2.04.00 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3460		0	-	0	0	3460	100
5.03.02.2.04.00 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	55		0	-	0	0	55	100
5.03.02.2.04.00 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberi Penghargaan	250		250	69.144.756,00	90,89	250	250	100
5.03.02.2.04.00 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan kedisiplinan	250		4	90.243.800,00	90,24	4	250	100
5.03.02.2.04.00 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Dispilin ASN	4		4	28.537.800,00	95,13	4	4	100
5.03.02.2.04.00 09	Pelayanan Proses Ijin Percerai Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Ijin Perceraian Pegawai yang dilayani	5		5	17.689.800,00	88,45	5	5	100
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan								
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan								

5.03.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53		44	5.405.521.000,00	79,07	44	53	100
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan								
5.03.01.2.05.00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3460		3460	39.886.800,00	79,77	3460	3460	100
5.03.01.2.05.00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	240		0	-	0	0	240	100
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan								
5.03.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30		30	90.811.000,00	90.82	30	30	100
5.03.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5		4	48.982.308,00	99,66	4	5	100
5.03.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20		25	149.135.728,00	90,5	25	20	100
05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Dikembangkan Kapasitasnya								
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional									

5.04.02.2.02 .00 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Hasil Laporan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	680		182	3.371.207.536,00	76,62	182	680	100
05.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian								
5.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan								
5.04.01.2.05.00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3460		3460	29.871.967,00	98,92	3460	3460	100



Malinau, 29 Desember 2023
Kepala BKPP Kab. Malinau,

JEMI.SH.,M.Si
NIP. 19690726 200312 1 008

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPP

Analisis Kinerja Pelayanan BKPP kabupaten Malinau dibuat berdasarkan tugas dan fungsi dari BKPP Kabupaten Malinau sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kepegawaian. Analisis Kinerja Pelayanan BKPP ini dibuat berdasarkan IKK sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan RENSTRA BKPP 2021-2026 yng juga termuat kedalam LPPD sebagai Indikator Kinerja Pelayanan dari BKPP Kabupaten Malinau.

Pada Tahun 2023 hasil analisis Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Malinau dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) ialah sebesar 0,65% dimana hal ini melebihi target yang ingin dicapai pada tahun 2023 yaitu sebesar 1,30%, hal ini dapat terjadi mengingat semangat para Pegawai untuk melanjutkan Pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi.
- b. Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) ialah sebesar 0,16% sesuai dengan target pada tahun 2023 yaitu 0,16%, meningkatnya jumlah pegawai fungsional disebabkan oleh penyesuaian jabatan pada eselon IV dan III sebagai jabatan Fungsional.
- c. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidakter masuk guru dan tenaga kesehatan) ialah 0,1597% dari target 1%, hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian jabatan structural ke fungsional (eselon IV dan III) dengan perbandingan banyaknya jabatan fungsional tersebut yang belum memiliki sertifikat kompetensi berbeda dengan jabatan fungsional sebelum adanya penyesuaian dimana dikatakan sebagai jabatan fungsional karena telah memiliki sertifikasi sebelumnya pada jabatan fungsional yang diinginkan.

Adapun untuk analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau dengan lebih lengkapnya dapat dilihat sesuai tabel dalam lampiran. Tabel 2.2 (Lampiran Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Malinau)

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Malinau

NO	INDIKATOR	IKK (Permendagri 18 Tahun 2020)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	5	6	7	7	9	9	10	11	12
1		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2,29	1,30	1,20	1,10	1,80	2,07	1,10	1	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,008	0,150	0,025	0,035	0,0150	0,16	0,035	0,045	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,526	1	1	1	0,0115	0,03	1	1	
	Persentase PNS menurut pendidikan										
	- SD/MI		0.7	0.7	0.7	0.7	0.74	0,49%	0.7	0.7	
	- SMP/MTs		1	1	1	1	0.94	0,77%	1	1	
	- SMA/MA/SMK		29.81	29.67	29.54	29.54	24.84	19,54%	25.7	25	
	- D1-D3		22.29	22.42	22.56	22.56	22.06	16,85%	23.5	23	
	- D4-S1		42.85	42.76	42.68	42.68	43.58	51,14%	41.5	41	
	- S2 dan S3		3.44	3.54	3.65	3.65	7.83	11,20%	8.2	8.5	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPP

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi OPD, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu penting di bidang kepegawaian, adapun isu-isu tersebut antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat PraJabatan/Pelatihan Dasar, PIM IV/PKP, PKA sebanyak 186 Peserta, Pendidikan Lanjutan ASN 80 Orang)
2. Pemanfaatan Manajemen Teknologi Informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian (E-SKP, E-Baperjakat)
3. Membangun kesadaran ASN melalui sosialisasi PP 53 Tahun 2010
4. Meningkatkan kedisiplinan dan kinerja ASN melalui penerapan aplikasi E-Kinerja
5. Dokumen Analisa Jabatan sangat diperlukan sbb:
 - Menyusun dan Menentukan formasi CPNSD yang diperlukan oleh masing-masing SKPD di Kab.Malinau.
 - Menentukan kebijakan mutasi dan rotasi PNS antar Instansi dan mutasi keluar daerah
 - Ketersediaan dokumen Anjab sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan

Selain isu-isu penting di atas ada banyak hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi OPD dapat disebutkan sebagai berikut :

✓ **Permasalahan dan Hambatan :**

1. Belum Optimalnya dalam melaksanakan pelayanan dalam bidang kepegawaian
2. Belum optimalnya akurasi data kepegawaian
3. Masih rendahnya kemampuan SDM ASN
4. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan ASN
5. Belum Optimalnya dalam penataan dan penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang ada
6. Belum Optimalnya Fasilitas Kesejahteraan ASN dan Data / Informasi serta pengembangan IT bidang Kepegawaian

✓ **Tantangan :**

1. Belum optimalnya OPD dalam perencanaan dan pelaporan

2. Perubahan dan Perkembangan Peraturan di Bidang kepegawaian
3. Penempatan Aparatur Birokrasi yang sesuai dengan Kompetensi masih sedikit
4. Pengaruh politik terhadap kebijakan-kebijakan kepegawaian.
5. Tuntutan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur untuk SKPD

✓ **Peluang :**

1. Perkembangan Teknologi Informasi Bidang Kepegawaian
2. Aparatur Daerah mengikuti perkembangan aturan-aturan kepegawaian
3. Aparatur banyak yang sudah mengetahui prosedur pelayanan kepegawaian
4. Meningkatnya kedisiplinan pegawai
5. Sumber Daya Aparatur yang berkompeten semakin meningkat
6. Komitmen Stake Holder untuk meningkatkan kesejahteraan ASN

Dari isu-isu penting, Permasalahan, Hambatan, tantangan, dan peluang sesuai penjelasan di atas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau menentukan kebijakan umum sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi agar dapat diakses dengan mudah
3. Peningkatan kualitas Pemahaman ASN terhadap PP 53 Tahun 2010
4. Penerapan EKin guna peningkatan kedisiplinan dan kinerja ASN
5. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan organisasi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, bahwa salah satu dokumen perencanaan yaitu dokumen RKPD mempunyai peran yang sangat strategis, karena berperan sebagai penghubung antara

kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional.
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.
3. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD.
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD.
5. Instrument bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah.
6. Instrument bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah.
7. Instrument bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolak ukur dan target atau sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan pada setiap program/ kegiatan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Malinau adalah sebagaimana tersebut terlampir dalam Tabel T-C. 31 (Lampiran Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Malinau)

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN MALINAU

OPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	KEPEGAWAIAN					KEPEGAWAIAN				21.962.356.499,00
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian		9.280.434.310,00
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawaian Yang dilaksanakan	100%		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawaian Yang dilaksanakan		618.835.000,00
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	55	Rp. 50.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	55	49.886.000,00
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Malinau	Jumlah Dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPk	300	Rp. 50.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Malinau	Jumlah Dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPk	300	49.854.000,00
3	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Malinau	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	100	Rp. 50.000.000	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Malinau	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	100	49.977.000,00
4	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi pelaksanaan Adminidtasi Pemeberhetian	75	Rp. 30.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi pelaksanaan Adminidtasi Pemeberhetian	75	249.970.000,00

5	Pengelolaan Data Kepegawaian	Malinau	Jumalh dokumen hasil pengelolaan Data Pegawai	200	Rp. 50.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Malinau	Jumalh dokumen hasil pengelolaan Data Pegawai	200	179.286.000,00
6	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Malinau	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Data, Informasi dan Ssistem Informasi Pegawai	3460	Rp. 40.000.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Malinau	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Data, Informasi dan Ssistem Informasi Pegawai	3460	39.862.000,00
	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah ASN Yang Mendapatkan Mutasi dan Promosi			Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah ASN Yang Mendapatkan Mutasi dan Promosi		220.000.000,00
	Pengelolaan Mutasi ASN	Malinau	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan mutasi habatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar Daerah	150	Rp.60.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Malinau	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan mutasi habatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar Daerah	150	100.000.000,00
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Malinau	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700	Rp.60.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Malinau	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700	60.000.000,00
	Pengelolaan Promosi ASN	Malinau	Jumalh Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN	20	Rp.100.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Malinau	Jumalh Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN	20	60.000.000,00
	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi			Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi		7.894.502.650,00
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Malinau	Jumlah ASN yang menngkat kapasitasnya	3459	Rp.70.000.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Malinau	Jumlah ASN yang menngkat kapasitasnya	3459	286.498.700,00
	Pengelolaan Assesssment Center	Malinau	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesssment Center	250	Rp.150.000.000	Pengelolaan Assesssment Center	Malinau	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesssment Center	250	150.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Malinau	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80	Rp.380.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Malinau	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80	7.458.003.950,00
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Presentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang dilaksanakan	100%		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Presentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang dilaksanakan	100%	547.096.660,00
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3460	Rp.200.000.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3460	200.000.000,00

	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	55	Rp.40.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	55	147.098.000,00
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Malinau	Jumlah ASN yang diberi Penghargaan	250	Rp.70.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Malinau	Jumlah ASN yang diberi Penghargaan	250	70.000.000,00
	Pembinaan Disiplin ASN	Malinau	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan kedisiplinan	250	Rp.70.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	Malinau	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan kedisiplinan	250	69.998.660,00
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Malinau	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4	Rp.20.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Malinau	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4	30.000.000,00
	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Malinau	Jumlah Dokumen Proses Ijin Perceraian Pegawai yang dilayani	5	Rp.20.000.000	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Malinau	Jumlah Dokumen Proses Ijin Perceraian Pegawai yang dilayani	5	30.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	6.748.370.189,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan selama setahun	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	6.092.121.039,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Malinau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	Rp.5.992.881.039	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Malinau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	6.092.121.039,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerahyang dilaksanakan	100%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerahyang dilaksanakan	100%	199.743.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Malinau	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3460	Rp.50.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Malinau	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3460	49.743.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Malinau	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	240	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Malinau	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	240	150.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan admisistrasi umum	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan admisistrasi umum		456.506.150,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Malinau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	Rp.100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Malinau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	99.998.150,00

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Malinau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Rp.60.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Malinau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	50.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Malinau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Malinau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	306.508.000,00
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5.933.552.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang Dikembangkan Kapasitasnya	100%		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang Dikembangkan Kapasitasnya	100%	5.885.253.000,00
	<i>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>		<i>Persentase ASN yang mendapatakn sertifikasi dan pengembangan Kompetensi</i>	100%		<i>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>		<i>Persentase ASN yang mendapatakn sertifikasi dan pengembangan Kompetensi</i>	100%	<i>5.885.253.000,00</i>
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Malinau	Jumlah Hasil Laporan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	186	974.959.534,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Malinau	Jumlah Hasil Laporan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	680	5.885.253.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	48.299.000,00
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Presentase Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</i>	100%		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Presentase Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</i>	100%	<i>48.299.000,00</i>
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3460	48.300.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3460	48.299.000,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempunyai hubungan fungsional dan profesional baik langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ada di pusat, maupun dengan kantor-kantor regional Badan Kepegawaian Negara yang tersebar pada delapan wilayah kerja.

Kebijakan pengembangan sumber daya aparatur negara sangat diperlukan bukan saja untuk menghadapi berbagai perubahan strategik ditingkat nasional dan internasional, tetapi terlebih lagi untuk mengisi pelaksanaan otonomi daerah.

Pada dasarnya langkah kebijakan tersebut berintikan pada pembangunan Sumber Daya Manusia aparatur negara yang profesional, netral dari pengaruh kekuatan politik, berwawasan global, bermoral tinggi, serta mempunyai kemampuan berperan sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Program Reformasi Birokrasi, yang di dalamnya mengamanatkan capaian kinerja mengenai : Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan, Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Ketatalaksanaan, Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Peningkatan Akuntabilitas, Perbaikan bidang pengawasan, Peningkatan Budaya Kerja/Etika Birokrasi.

Komitmen Badan Kepegawaian Negara untuk membangun sistem manajemen PNS dituangkan dalam visi Badan Kepegawaian Negara dalam renstra 2020-2024, yaitu: “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Pemahaman “professional” dalam visi tersebut merupakan wujud komitmen Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga yang mengedepankan kompetensi yang memadai dan bekerja dengan dedikasi yang tinggi serta dan berorientasi pada prestasi kerja dalam melaksanakan tugas pembinaan manajemen kepegawaian secara nasional.

Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (21) bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan paratur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggung jawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit yaitu kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, warna kulit dan asal usul, jenis kelamin, umur atau kondisi kecacatan.

Beberapa unsur yang sama dari visi dan rencana strategi baik Badan Kepegawaian Negara maupun Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau adalah menyangkut pengelolaan manajemen kepegawaian guna mewujudkan Aparatur Profesional yang diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPP

Dalam Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau Tahun 2021- 2026 menetapkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Terwujudnya Aparatur Yang Profesional

B. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian
2. Meningkatnya PNS Yang Berkompetensi Sesuai Bidang Tugasnya
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah..

3. Program dan Kegiatan BKPP

A. Program BKPP

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau.

Oleh karena kebijakan teknis yang diambil pada dasarnya untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, maka Program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau ada 3 Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

B. Kegiatan BKPP

Untuk merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Rencana Kerja inilah yang akan dipertanggungjawabkan dalam Pelaporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau dan sebagai acuan dalam Penyusunan anggaran berbasis kinerja, maka Rencana Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau untuk tahun 2024 sebanyak 8 Kegiatan dan 26 Sub.Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

➤ Kegiatan Adminstrasi Keuangan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

➤ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

➤ **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Sub.Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

2. Program Kepegawaian Daerah

➤ **Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

- a. Sub.Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN.
- a. Sub.Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- b. Sub.Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
- c. Sub.Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan,Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan ASN
- d. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- e. Sub.Kegiatan Evaluasi Data,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

➤ **Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**

- a. Sub.Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- b. Sub.Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
- c. Sub.Kegiatan Mutasi ASN

➤ **Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**

- a. Sub. Kegiatan Pengelolaan Asessment Center
- b. Sub.Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- c. Sub.Kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN

➤ **Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

- a. Pembinaan Disiplin ASN
- b. Sub.Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
- c. Sub.Kegiatan Penyusunan Kebiakan Penilaian dan Evaluasi Kineja Aparatur
- d. Sub.Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
- e. Sub.Kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- f. Sub.Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Apartur

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

➤ **Kegiatan Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional**

- a. Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Malinau adalah sebagaimana tersebut terlampir dalam Tabel T-C. 33 (Lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Malinau)

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab.Malinau

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan	: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian							
	KEPEGAWAIAN								
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100						
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawaian Yang dilaksanakan	100						
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Malinau	55	49.886.000,00	APBD		55	50.000.000,00
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Malinau	300	49.854.000,00	APBD		300	50.000.000,00
3	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Malinau	100	49.977.000,00	APBD		100	50.000.000,00
4	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi pelaksanaan Adminidtasi Pemeberhetian	Malinau	75	249.970.000,00	APBD		75	30.000.000,00

5	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumalh dokumen hasil pengelolaan Data Pegawai	Malinau	200	179.286.000,00	APBD		200	50.000.000,00
6	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Data, Informasi dan Ssistem Informasi Pegawai	Malinau	3460	39.862.000,00	APBD		3460	30.000.000,00
	Keg. Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Mutasi dan Promosi	100						270.000.000,00
7	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan mutasi habatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar Daerah	Malinau	150	100.000.000,00	APBD		150	100.000.000,00
8	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Malinau	700	60.000.000,00	APBD		700	70.000.000,00
9	Pengelolaan Promosi ASN	Jumalh Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN	Malinau	20	60.000.000,00	APBD		20	100.000.000,00
	Keg. Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	100						470.000.000,00
10	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang menngkat kapasitasnya	Malinau	3459	286.498.700,00	APBD		3459	70.000.000,00
11	Pengelolaan Assesssment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesssment Center	Malinau	250	150.000.000,00	APBD		0	-
12	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Malinau	80	7.458.003.950,00	APBD		80	400.000.000,00
	Keg Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja AParatur Yang Dilaksanakan	100						420.000.000,00
13	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Malinau	3460	200.000.000,00	APBD		3460	200.000.000,00
14	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Malinau	55	147.098.000,00	APBD		55	40.000.000,00
15	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberi Penghargaan	Malinau	250	70.000.000,00	APBD		250	70.000.000,00
16	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan kedisiplinan	Malinau	250	69.998.660,00	APBD		250	70.000.000,00

17	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Malinau	4	30.000.000,00	APBD		4	20.000.000,00
18	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Ijin Perceraian Pegawai yang dilayani	Malinau	5	30.000.000,00	APBD		5	20.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100						6.868.361.505,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	100						6.237.591.039,00
19	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Malinau	53	6.092.121.039,00	APBD		45	6.237.591.039,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	100						50.000.000,00
20	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Malinau	3460	49.743.000,00	APBD		3460	50.000.000,00
21	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Malinau	240	150.000.000,00	APBD		0	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	100						580.770.466,00
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia						3	50.000.000,00
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Malinau	30	99.998.150,00	APBD		30	100.000.000,00
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Malinau	5	50.000.000,00	APBD		5	60.000.000,00
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Malinau	20	306.508.000,00	APBD		20	370.770.466,00
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Dikembangkan Kapasitasnya	100						1.053.759.534,00

	<i>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	<i>Jumlah Sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional Yang Dllaksanakan</i>	100						1.053.759.534,00
26	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Hasil Laporan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Malinau	680	5.885.253.000,00	APBD		184	1.053.759.534,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100						50.000.000,00
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Presentase Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</i>	100						50.000.000,00
27	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Malinau	3460	48.299.000,00	APBD		3460	50.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut terlampir dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(Rencana Penganggaran berdasarkan Pagu Indkatif RKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

Prioritas RKPD	IKU/IKK/SPM/ NSPK	Permasalahan/Isu Strategis (yang berkaitan dengan pencapaian Prioritas RKPD dan IKK)	No.	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Asal Usul Kegiatan (Musrenban g, POKIR, Inisiatif OPD)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran	100%		
				X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan selama setahun	100%		
			1	X XX 01 2.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	5,992,881,039.0 0	
				X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan			

			2	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3460 Dokumen	50,000,000	
			3	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3460 Dokumen	48,300,000	
				X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan admistrasi umum	100%		
			4	X XX 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	5 Paket	75,750,000.00	
			5	X XX 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	100,000,000.00	
			6	X XX 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	4 Paket	40,000,000.00	
			7	X XX 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, konsultasi dan koordinasi SKPD	50 Laporan	400,000,000.00	
				5.03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan Kpegawaian	100%		
(P6) Reformasi Birokrasi dan	Persentase PNS yang sesuai			5 03 02 2 01	Pengadaan ,Pemberhetian dan Informasi Kepegawaian ASN				

Pelayanan Publik	dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi	Penetapan NIP CPNS dan NIPPPK hasil selski 2021	8	5 03 02 2 01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	100 Laporan	50,000,000.00	Inisiatif OPD
	Persentase Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu	Perlunya Pelayanan Kepada ASN untuk mendapatkan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Pensiun	9	5 03 02 2 01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	75 Dokumen	30,000,000.00	Inisiatif OPD
		Perlunya Pemuktahiran Database Kepegawaian	10	5 03 02 2 01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	200 Dokumen	50,000,000.00	Inisiatif OPD
			11	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	3460 Laporan	40,000,000	
			12	5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan,Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan,Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	55 Dokumen	50,000,000	
			13	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	300 Dokumen	50,000,000	
(P6) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Jumlah jabatan pimpinan tinggi dan Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah			5.03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan Kepgawaian	100%		
				5 03 02 2 02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan Mutasi dan Promosi	100%		

		Kurang responnya Pegawai terhadap usulan perbaikan berkas Kenaikan Pangkat terutama pada Dinas Pendidikan yang sering terlambat merespon BTL (berkas tidak lengkap) sehingga mengakibatkan usulan kenaikan pangkat menjadi TMS (tidak memenuhi syarat).	14	5 03 02 2 02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Laporan	75,000,000.00	Inisiatif OPD
		Terdapat Kekosongan pada Jabatan Tinggi dan Jabatan Administasi pada Instansi Pemerintah	15	5 03 02 2 02 03	Sub. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	202 Dokumen	300,000,000.00	Inisiatif OPD
			16	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antas Daerah	230 Dokumen	60,000,000	
				5.03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan Kepegawaian	100%		

				5 03 02 2 03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi yang didapatkan ASN	100%		
(P6) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Perlunya Meningkatkan kualitas SDM sesuai kebutuhan Organisasi	17	5 03 02 2 03 04	Sub.Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	380,000,000.00	Inisiatif OPD
			18	5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	250 Dokumen	150,000,000	
			19	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN Yang Meningkat Kapasitasnya	3459 Orang	70,000,000	
(P6) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Persentase PNS yang sesuai dengan kompetensi dan	Kurangnya pemahaman secara menyeluruh tentang penerapan disiplin PNS		5.03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapatakan pelayanan Kepgawaian	100%		
				5.03 02 2 04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				
			20	5.03 02 2 04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan	250 Orang	70,000,000.00	

	kebutuhan organisasi	oleh OPD sesuai PP No. 53 tahun 2010.				Pembinaan Kedisiplinan			
			21	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN Yang Diberikan Penghargaan	250 Orang	70,000,000	
			22	5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3460 Dokumen	200,000,000	
			23	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penlaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penlaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	55 Dokumen	40,000,000	
			24	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Displin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan	20,000,000	
			25	5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen	20,000,000	

	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Banyaknya Pejabat Struktural yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan (khususnya Diklat PIM IV/PKP) hal ini berkaitan dengan ketersediaan anggaran.		5.04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%		
				5 04 02 2 02	Sertifikasi,Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mendapatakn sertifikasi dan pengembangan Kompetensi	100%		
			26	5 04 02 2 02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompentensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fuingsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	186 Laporan	974,959,534	Inisiatif OPD
TOTAL								8,926,140,573	

BAB V PENUTUP

A. Catatan Penting

Renja BKPP Kabupaten Malinau Tahun 2024 merupakan dokumen rencana kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau yang dilaksanakan selama tahun 2024. Oleh karena itu setiap PNS di lingkungan BKPP Kabupaten Malinau wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renja BKPP Kabupaten Malinau ini. Fungsi Renja SKPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja BKPP Kabupaten Malinau Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan, berdasarkan Renstra BKPP Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Malinau. Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau sehingga disusunlah Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 dengan 3 (tiga) Program dan 26 (dua puluh enam) sub.Kegiatan yang bersumber dananya dari APBD Kabupaten Malinau Tahun 2024.

C. Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Renja Renja BKPP Kabupaten Malinau Tahun 2024 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja BKPP Kabupaten Malinau selama Tahun Anggaran 2024, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam satu tahun ke depan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau Tahun 2024 ini akan diupayakan dilaksanakan dalam melayani seluruh pegawai Kabupaten Malinau guna meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional.

Demikian Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau Tahun 2024 disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malinau, 06 Maret 2023
Kepala BKPP,

JEMI, SH., M.Si
Pembina TK. I, IV/b
NIP. 19690627 200312 1 008